

# Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Novindra Dwi Setiana<sup>1</sup>, Nur Laila Yuliani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang \*Email: penulis\_korespondensi  
\*email: [indradwi879@gmail.com](mailto:indradwi879@gmail.com)

## Abstrak

**Keywords:**  
*understanding, role of village apparatus, accountability of village fund management*

*This study is aimed at empirically examining the influence of village apparatus and role of village apparatus on accountability of village fund management. The sample of this research is village apparatus whose village get village fund in Mungkid sub-district, Magelang regency. The method of sampling is purposive sampling which the criteria is the village apparatus consisting of the village head, village secretary, head of financial affairs, head of general affairs, government, and the head of the hamlet with a minimum 1 year working period and minimum education level of senior high school. The number of samples according to the criteria were processed in this study was 84 respondents. Hypothesis test is done by using multiple regression analysis, F-test and t-test. The results showed that the role of village apparatus had a positive effect on the accountability of village fund management, while the understanding of the village apparatus did not affect the accountability of the village fund management.*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Pemberitaan media yang banyak membahas kasus korupsi yang menjerat kepala desa, maka tentunya perlu disiapkan

mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Anggaran dana desa sebesar Rp. 46,9 Triliun yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya UU tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala desa berikutnya ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades. Melainkan karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran.

Anggaran desa yang diperoleh oleh setiap pemerintah desa yang cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Karena menurut pendamping desa untuk wilayah di kecamatan Mungkid untuk penatausahaan alokasi dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menguji secara empiris peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, dan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pemahaman perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## 2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa se-Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 14 Desa di Kecamatan Mungkid yang mendapatkan dana desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi Kesra, dan kepala dusun.
- b. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner. Variabel-variabel penelitian tersebut diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi beberapa pernyataan. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini merupakan replikasi yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya dengan mengacu pada landasan teoritis yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari masing-masing variabel penelitian tersebut, responden diminta untuk memberikan penilaian atau pendapat dengan skala Likert 1-5. Angka 1 menunjukkan penilaian atau pendapat sangat tidak setuju (STS) sampai dengan angka 5 yang menunjukkan penilaian/pendapat sangat setuju (SS).

## 2.1. Teknik Analisis Data

### 2.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut [8]

### 2.1.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien cronbach alpha ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,70 atau 70% [8]

## 2.2. Pengujian Hipotesis

### 2.2.1. Koefisien Determinasi $R^2$

Koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen [8].

### 2.2.2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*) [8]. Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak.

### 2.2.3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen [8]. Proses pengujian ini dilakukan berdasarkan t hitung dengan tingkat kepercayaan 5%.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa indikator-indikator dengan nilai uji validitas  $> 0,50$  adalah valid. Namun terdapat 14 pernyataan yang tidak valid pada variabel APD pada instrumen 1-9, 14-16 dan 22,24. Pernyataan tersebut tidak valid karena memiliki nilai cross loading  $< 0,50$  sehingga tidak dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

### 3.2. Uji Reabilitas

Berdasarkan hasil Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki Cronbach's Alpha Based On Standardized Items  $> 0,70$  sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

### 3.3. Regresi Linier Berganda

Hasil uji Analisis Linier Berganda

| Model          | Unstandar<br>dized<br>Coefficient |                   | Standar<br>dized<br>Coeffici<br>ents |  | T         | Sig.      |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
|                | B                                 | Std.<br>Erro<br>r | Beta                                 |  |           |           |
| (Const<br>ant) | 2,3<br>44                         | 0,2<br>56         |                                      |  | 9,7<br>51 | 0,0<br>00 |
| PPD            | 0,3<br>94                         | 0,0<br>69         | 0,584                                |  | 5,7<br>15 | 0,0<br>00 |
| PD             | 0,0<br>99                         | 0,0<br>71         | 0,143                                |  | 1,3<br>97 | 0,1<br>66 |

Sumber :Data primer diolah, 2017

$$APD = 2,344 + 0,394 PPD + 0,099 PD + e$$

### 3.4. Uji Hiotesis

#### 3.4.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil uji Adjusted R Square besarnya Adjusted R Square adalah 0,448. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman dan peran peran perangkat desa mampu menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 44,8%, sedangkan sisanya 55,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini.

#### 3.4.2. Uji F (Goodness Of Fit)

Berdasarkan jumlah  $n = 84$  dan  $k = 3$ , maka  $df_1 = 2$  dan  $df_2 = 81$ , maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,11. Nilai F hitung  $34,630 > F_{tabel} 3,11$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti model yang digunakan dalam penelitian ini bagus (fit). Artinya variabel pemahaman dan peran perangkat desa mampu menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa secara baik.

#### 3.4.3. Uji t

| Variabe<br>l | t<br>hitung | Sig.      | t<br>table | Keteranga<br>n          |
|--------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|
| PPD          | 5,71<br>5   | 0,00<br>0 | 1,98<br>9  | $H_1$<br>Diterima       |
| PD           | 1,39<br>7   | 0,16<br>6 | 1,98<br>9  | $H_2$ Tidak<br>diterima |

Sumber :Data primer diolah, 2017

- Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa thitung lebih besar dari ttabel ( $5,715 > 1,989$ ) dan  $P \text{ value} < \alpha$  yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga  $H_1$  diterima.
- Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa thitung lebih kecil dari ttabel ( $1,397 < 1,989$ ) dan  $P \text{ value} > \alpha$  yaitu  $0,166 > 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  $H_2$  tidak diterima.

### 3.5. Pembahasan

#### 3.5.1. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan berperanya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan. Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala desa. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49. Jadi tidak ada lagi perangkat desa yang tidak membantu dalam pengelolaan dana desa, dan tidak adalagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan sepihak. Penelitian ini sesuai dengan teori Agensi yang menyatakan bahwa ada hubungan kontraktual antara principals dan agent dimana kepala desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan terhadap perangkat desa sebagai agen yang ikut berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Irma (2015) yang menunjukkan

bahwa perangkat desa berjalan dengan baik terhadap akuntabilitas dana desa

### **3.5.2. Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil pengujian pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh pemahaman perangkat desa tentang UU No 6 Tahun 2014. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggungjawab perangkat desa, tanpa mempertimbangkan pemahaman tentang UU No 6 Tahun 2014. Berdasarkan teori Agensi yang menyatakan bahwa ada hubungan kontraktual antara principals dan agent dimana kepala desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan, perangkat desa sebagai agen yang ikut berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perlu adanya pendampingan perangkat desa untuk pemahan tentang pengelolaan dana desa tersebut. Pemahaman perangkat desa tersebut diharapkan akan membuat desa tersebut akan lebih tanggungjawab untuk pengelolaan dana desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dailiati dan Sudaryanto (2016) yang menunjukkan hasil dalam penelitiannya bahwa ada peningkatan pemahaman UU No. 6 tahun 2014.

## **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 84 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel Peran Perangkat Desa dan

Pemahaman Perangkat Desa dalam menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 44,8% sedangkan sisanya 55,2% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.

2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desaberperengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dan Pemahaman Perangkat Desa tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## **REFERENSI**

- [1] Petroleum Gas Storage Operations. Universiti Teknologi Malaysia; 2006.
- [2] Arifiyanto Dwi Febri. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Jurnal Penelitian Univesitas Jember
- [3] Badan Pengawas Keuagandan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- [4] Badan Pengawas Keuagandan Pembangunan. 2015Buku Saku: Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Sealatan.
- [5] Bastian, Indra. 2006. Akuntansi SektorPublik; Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- [6] Dailiati, Sudaryanto 2016. Peningkatan pemahaman UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar). Jurnal Penelitian Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
- [7] Fajri Rahmi, Endah Setyowati dan Siswidiyanto. 2015.Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi

- Dana Desa (Studi pada kantor desa ketindan, kecamatan lawang, kabupaten Malang). Jurnal Penelitian Universitas Brawijaya Malang.
- [8] Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [9] Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- [10] Hanifah Suci Indah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Peratanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes). Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- [11] Hery. 2014. Akuntansi Dasar 1 & 2. Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- [12] Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- [13] Irma Ade.2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dikecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.Jurnal Peneliti. Palu Sulawesi Tengah.
- [14] Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. KebijakanUmum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014).
- [15] KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa; Alokasi Dana Desa
- [16] Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres
- [17] Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- [18] Nordiawan, Deddi. 2006. Akutansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.